

# Pendidikan Masyarakat sebagai Jalan Menuju Kemandirian Desa: Studi Model Fasilitasi Desa Wisata

Muhammad Khoirul Fatihin, Sucipto, Zulkarnain, Kukuh Miroso Raharjo

Universitas Negeri Malang, Indonesia

\*Corresponding author, email: muhammad.khoirul.2101419@students.um.ac.id

## Keywords

Pendidikan Masyarakat

Desa Wisata

Fasilitator

## Abstract

The development of community-based tourism villages requires a participatory approach that places local communities as the main actors in the development process. Facilitators have a strategic role as companions who encourage critical awareness, community organizing, and local capacity building through training, reflection forums, and mapping of village potential. This article aims to examine the role of community education in building village independence through a study of tourism village facilitation models, by highlighting the process of empowerment, capacity building, and collaboration between stakeholders in realizing an independent and sustainable village. This research uses a qualitative approach with a case study type to understand in depth the phenomenon that occurs in the process of facilitating the development of tourism villages through community education. The concept of critical education is applied to increase the cognitive capacity and social action of the community, by valuing local experience and knowledge as development capital. Strengthening village institutions such as BUMDes and Pokdarwis is an important component in creating sustainable economic and social impact. Multi-stakeholder collaboration through a pentahelix approach between the government, facilitators, academics, business actors, the community, and the media has also strengthened the tourism village ecosystem. Empowering village communities through participatory education and critical facilitation is the key to realizing inclusive, equitable, and sustainable development. Thus, the facilitator not only assists technically, but also revives the role of the community as a subject in the development of their village.

## Abstrak

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat membutuhkan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Fasilitator memiliki peran strategis sebagai pendamping yang mendorong kesadaran kritis, pengorganisasian komunitas, dan penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan, forum refleksi, dan pemetaan potensi desa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan masyarakat dalam membangun kemandirian desa melalui studi model fasilitasi desa wisata, dengan menyoroti proses pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada proses fasilitasi pengembangan desa wisata melalui pendidikan masyarakat. Konsep pendidikan kritis diterapkan untuk meningkatkan kapasitas kognitif dan aksi sosial masyarakat, dengan menghargai pengalaman serta pengetahuan lokal sebagai modal pembangunan. Penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes dan Pokdarwis menjadi komponen penting dalam menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi multi pihak melalui pendekatan pentahelix antara pemerintah, fasilitator, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media turut memperkuat ekosistem desa wisata. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan partisipatif dan fasilitasi kritis menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, fasilitator bukan hanya mendampingi secara teknis, melainkan menghidupkan kembali peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desanya.

## 1. Pendahuluan

Desa memiliki potensi besar dalam aspek sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak desa masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi tersebut menjadi aset yang dapat dikembangkan untuk menjadi alternatif penghidupan bagi masyarakat desa. Tantangan tersebut baik dari segi sumber daya manusia, kelembagaan, maupun inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti

desa wisata. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan masyarakat memegang peranan penting dalam membangun kemandirian desa melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan (Dewi & Amallia, 2017; Suyanto et al., 2024; Zulkarnain et al., 2022).

Pendidikan masyarakat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan produktif, pendampingan, serta penguatan kelembagaan, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha kreatif, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata berbasis kearifan lokal (Abidin, 2024; Isa & Anu, 2024; Sulaiman et al., 2022). Selain itu, pendidikan masyarakat juga mendorong partisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga tercipta inovasi yang inklusif dan berkelanjutan (Abidin, 2024; Nazeri et al., 2024; Zulkarnain et al., 2022).

Model fasilitasi desa wisata yang berbasis pendidikan masyarakat menjadi salah satu strategi efektif untuk mewujudkan kemandirian desa. Pada pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sekaligus subjek pembangunan yang mampu menjadi aktor untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang, dan mengelola program secara partisipatif. Studi tentang model fasilitasi ini penting untuk memberikan gambaran praktik baik, tantangan, serta rekomendasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing (Abidin, 2024; Sucipto & Fatihin, 2024; Sulaiman et al., 2022; Suyanto et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan masyarakat dalam membangun kemandirian desa melalui studi model fasilitasi desa wisata, dengan menyoroti proses pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada konteks fasilitasi pengembangan desa wisata melalui pendidikan masyarakat (Rashid et al., 2019). Studi kasus dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena kompleks dalam lingkungan nyata, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman holistik dan kontekstual terhadap kasus yang diteliti. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan potensi kasus dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap isu yang diangkat (Baxter & Jack, 2008; Miller et al., 2022). Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh dianggap cukup (Creswell & Creswell, 2017; Rashid et al., 2019).

Analisis data dilakukan secara tematik, dimulai dari transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, hingga interpretasi makna yang terkandung dalam data. Peneliti secara aktif melakukan refleksi dan validasi silang antar data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil analisis (Kiger & Varpio, 2020; Lochmiller, 2021). Pemilihan lokasi didasarkan pada kemenarikan kasus pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam memfasilitasi proses pengembangan desa wisata di salah satu desa di Kabupaten Malang, yang telah berhasil memfasilitasi pembentukan desa wisata dan menyiapkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa seperti karang taruna, kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok tani, serta BUMDes untuk terlibat aktif pada proses pengelolaannya.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **3.1. Peran Fasilitator sebagai Katalis Literasi Sosial dan Ekonomi di Desa Wisata**

Fasilitator dalam pengembangan program desa wisata tidak hanya berperan sebagai pelatih teknis, tetapi juga sebagai pendamping proses masyarakat, terutama dalam hal belajar kolektif masyarakat desa. Kehadiran fasilitator atau pendamping desa menjadi angin segar bagi masyarakat

desa sebagai pendamping masyarakat dalam menemukan potensi wilayahnya. Sebagai aktor di tingkat lokal, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi wilayahnya untuk dikembangkan dan dioptimalkan pengelolaannya. Mereka memperkenalkan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dengan memfasilitasi diskusi dan membimbing masyarakat memahami rantai nilai ekonomi lokal. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat memberikan dampak signifikan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata seperti homestay, kuliner, dan festival. Pengembangan program berbasis masyarakat ini terbukti dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan usaha mikro serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui BUMDes, kelompok tani dan sentra kuliner (Hariyadi et al., 2024; Nugroho, 2022; Sucipto & Fatihin, 2024).

Salah satu lembaga desa yang dapat mengorganisasikan berbagai potensi desa adalah BUMDes, yang berperan sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial (Raharjo et al., 2024). Proses pengelolaan BUMDes perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan objek wisata. Partisipasi masyarakat memperkuat kepemilikan lokal terhadap destinasi wisata dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif (Salma et al., 2022). Dari proses pengelolaan ini terdapat pula peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor kuliner dan ekonomi kreatif lokal (Priatmoko et al., 2021).

Kehadiran fasilitator menjadi aktor penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis dan identitas ekonomi baru berbasis potensi desa, bukan sebagai aktor yang melakukan eksekusi berbagai rencana pengembangan program. Fasilitator berperan penting dalam tiga tahap: edukasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis melalui pelatihan dan identifikasi aset desa, aksi untuk mendorong masyarakat berpikir kritis dan merancang program berbasis potensi lokal, dan advokasi untuk membuka akses pasar, modal, serta memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung ekonomi desa secara berkelanjutan (Fatihin et al., 2021). Kehadiran pendamping desa mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta mengoptimalkan aset lokal secara emansipatif. Fasilitator membantu masyarakat untuk terlibat aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi desa (Suharto, 2019). Kehadiran pariwisata berbasis masyarakat ini telah diterapkan dengan baik di berbagai desa wisata, memberikan manfaat kepada penduduk lokal secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik (Oka et al., 2021).

### **3.2. Pemberdayaan Melalui Pendidikan Kritis Berbasis Potensi Lokal**

Pendidikan masyarakat yang difasilitasi secara partisipatif mengajak warga mengenali, menghargai, dan mengembangkan potensi budaya dan alam mereka sendiri sebagai aset wisata berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan pemetaan partisipatif dan forum refleksi masyarakat desa yang didampingi fasilitator. Peran fasilitator sebagai pendamping harus nampak untuk memberikan kesetaraan hak bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Melalui forum ini, penguatan kapasitas masyarakat secara *bottom-up* dapat sejalan dengan prinsip *Community Based Tourism* (Pratiwi et al., 2023).

Pendidikan kritis bagi masyarakat desa dilakukan dengan proses dialogis dan menghargai pengalaman (Edwards, 2023). Pendidikan kritis dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan kognitif, pemecahan masalah, dan aksi sosial, sehingga masyarakat lebih mampu mengelola potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Pengembangan pendidikan, termasuk literasi digital dan literasi manusia, berperan penting dalam mendukung potensi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi (Diduck, 1999; Sukmawati & Maryanti, 2021). Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dilakukan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dengan fokus pada SDM lokal dan kelembagaan desa untuk memperkuat keberlanjutan program (Saepudin, 2022).

Pengembangan masyarakat desa dilakukan untuk menangani isu-isu sosial, termasuk yang berkaitan dengan ketidaksetaraan. Seringkali kelompok masyarakat marginal tidak dilibatkan dalam proses partisipatif perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal perlu difasilitasi melalui pendampingan dan pendidikan kritis agar terjadi peningkatan kesadaran kritis yang terarah dan fokus untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik (Freire, 2005; Lynch et al., 2020;

Pawar, 2019). Proses pendidikan tidak hanya terbatas pada institusi formal, melainkan dapat berlangsung di berbagai konteks masyarakat. Pendidikan nonformal berperan penting dalam memberdayakan masyarakat dan kelompok masyarakat melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif (Topatimasang et al., 2010). Pengembangan kapasitas masyarakat desa harus berbasis pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, bukan sekadar intervensi dari luar. Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang, perilaku, dan metode para pelaku pembangunan agar benar-benar memberdayakan masyarakat desa sesuai realitas dan potensi lokal mereka (Chambers, 1983, 1997).

Pada banyak kasus, terjadi banyak praktik pengembangan masyarakat yang mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat, sehingga mengakibatkan kegagalan proyek atau program. Jika tidak dievaluasi terjadi kemungkinan akan mengulangi kesalahan dan kegagalan yang sama di program berikutnya (Lohman et al., 2023). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan faktor strategis dan penting dalam menentukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, serta mengelola aset dan memajukan masyarakat secara berkelanjutan, terutama di tingkat desa (Luthfia, 2013; Sulaiman et al., 2016; Suswanto et al., 2019). Pada pengelolannya diperlukan perhatian terhadap tiga pilar pembangunan berkelanjutan: sosial, alam, dan ekonomi (Morse & McNamara, 2013). Untuk itu, proses pendidikan kritis masyarakat perlu diarahkan untuk menganalisis pilar-pilar tersebut. Kerangka konseptual menetapkan bahwa modal manusia, fisik, dan sosial juga sangat penting bagi masyarakat (Wondimu et al., 2022). Dengan demikian beragam potensi tersebut perlu diidentifikasi secara holistik sebagai modal pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat mempersiapkan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat mengidentifikasi dan merencanakan secara partisipatif untuk mengembangkan dan memperkuat dan memberdayakan potensi mereka (Faizal, 2015). Pada konteks ini, fasilitator memegang peran sentral dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam menumbuhkan kesadaran kritis dan membangun identitas ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal (Orbawati et al., 2024). Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam memfasilitasi pembelajaran masyarakat (Grace & Harrington, 2015; Harris et al., 2013; Shaked, 2016; Sucipto & Fatihin, 2024).

Proses identifikasi aset dan potensi lokal harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, agar berbagai sumber daya yang tersedia dapat dikelola dengan tepat (Raharjo et al., 2024). Fasilitator berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan dan inklusif (Fatihin et al., 2021; Hanifa et al., 2021; Orbawati et al., 2024).

### **3.3. Penguatan Kepemimpinan Lokal sebagai Pilar Kemandirian melalui Fasilitasi Belajar Kolektif**

Fasilitator memiliki peran penting untuk memperkuat kapasitas tokoh lokal sebagai agen perubahan, bukan menggantikan mereka. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan kader wisata, mentoring administrasi BUMDes, dan pengorganisasian kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sehingga proses pemberdayaan menjadi milik masyarakat. Pelatihan SDM yang berkelanjutan dan program pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan inovasi produk wisata menjadi salah satu alternatif pengembangan program agar dapat meningkatkan kapasitas secara kolektif (Suherlan et al., 2022). Melalui proses terstruktur dalam mengorganisir kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memungkinkan individu menjadi agen perubahan dalam hidup mereka (Ife, 2016; Kenny et al., 2018; Rohmah et al., 2018).

Fasilitator tidak boleh memandang masyarakat dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah sosial (Filmawada et al., 2018). Pariwisata berbasis masyarakat desa ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun membutuhkan dukungan infrastruktur, pelatihan SDM, dan kelembagaan yang kuat (Aminuddin et al., 2022). Sehingga untuk mempercepat pencapaian program pembangunan dan

akses masyarakat, seorang fasilitator harus memiliki kemampuan untuk bekerjasama antar individu dan kelompok(Sucipto et al., 2024).

fasilitator berperan mendukung dan memperkuat masyarakat lokal sebagai agen perubahan utama dalam pengembangan desa, dengan menekankan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan oleh tokoh lokal sendiri(Inten, 2024). Proses pengambilan keputusan di tingkat lokal harus dibarengi dengan kepemilikan kapasitas yang cukup, agar proses pengelolaan di level masyarakat tidak carut marut dan berakibat pada kerusakan tatan sosial dan ekologi yang dapat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Kehadiran fasilitator berperan sebagai moderator dan motivator, bukan instruktur, dalam memetakan kebutuhan dan merumuskan strategi pengembangan desa wisata berbasis refleksi dan inisiatif masyarakat lokal(Sunarjanto et al., 2021). Dengan demikian, fasilitator tidak mendikte arah, tetapi memfasilitasi diskusi dan dialog antar masyarakat desa, menjaga agar semua suara terdengar dan diakomodir serta menjaga proses berjalan inklusif. Fasilitator perlu menghadirkan optimisme untuk mendorong dan memberi semangat pada masyarakat agar percaya pada potensi mereka sendiri serta termotivasi untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa wisata. Peran fasilitator diperlukan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mempercepat pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan komunitas setempat(Habibi, 2022).

Peran fasilitator yang diemban oleh pendamping desa dapat memfasilitasi pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok sadar wisata dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, penguatan jejaring dan penguatan kapasitas lokal(Krisna et al., 2024). Pemerintah desa berperan sebagai regulator, stimulator, dan koordinator dalam pengembangan desa wisata, termasuk kolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal(Anggaini & Juviano, 2023).

Kolaborasi antara fasilitator, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk pemberdayaan dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan(Anggaini & Juviano, 2023; Habibi, 2022; Krisna et al., 2024). Kolaborasi multi pihak juga diperlukan untuk semakin memperkuat jejaring kemitraan bagi pengelolaan desa wisata. Kolaborasi multi pihak dikenal juga dengan kolaborasi pentahelix, yaitu kolaborasi dari lima unsur antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat(Hasan et al., 2025; Rahu & Suprayitno, 2021). Kemandirian desa dapat terwujud ketika fasilitator mendukung munculnya kepemimpinan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan pada tokoh dan program yang berasal luar.

#### **4. Kesimpulan**

Pada pengembangan program desa wisata, fasilitator memiliki peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar pelatih teknis. Mereka bertindak sebagai pendamping proses belajar kolektif masyarakat desa, memfasilitasi identifikasi potensi lokal, dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap sumber daya yang dimiliki. kehadiran fasilitator dalam program desa wisata bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga membangun kesadaran, kemandirian, dan identitas ekonomi baru yang berakar pada potensi lokal dan kekuatan kolektif masyarakat desa.

Pendidikan masyarakat yang difasilitasi secara partisipatif menjadi kunci dalam pemberdayaan desa wisata, dengan menempatkan fasilitator sebagai pendamping yang mendorong dialog kritis, refleksi kolektif, dan identifikasi potensi lokal secara inklusif. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diajak untuk mengenali, menghargai, dan mengelola aset budaya, alam, dan sosial mereka secara berkelanjutan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi dan literasi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis untuk mengatasi ketimpangan serta membangun identitas ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Fasilitator berperan penting dalam mendorong masyarakat desa sebagai agen perubahan melalui pendampingan, pelatihan, dan pengorganisasian yang partisipatif. Bukan sebagai instruktur, fasilitator memfasilitasi dialog, memperkuat kapasitas lokal, dan mendorong kolaborasi pentahelix untuk mendukung pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

## Referensi

- Abidin, Z. (2024). Innovative Community Service Programs with Local Participation to Build Independent Villages. *Zabags International Journal of Engagemnt*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.61233/zijen.v2i1.17>
- Aminuddin, H., Nailufar, F. D., & Mujiburrohman, M. A. (2022). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Journal of Public Power*, 6(2), 76–84. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6102>
- Anggaini, N. L. V., & Juviano, J. (2023). *The Role of Local Government in Tourism Village Development*. 230–238.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Prentice Hall.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?: Putting the first last*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dewi, L. K., & Amallia, N. (2017). THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES TOWARD INDEPENDENT VILLAGES (STUDY IN PEKON AMBARAWA, AMBARAWA SUB-DISTRICT, PRINGSEWU). *Proceeding ICSTIEM 2017*, 1(1).
- Diduck, A. (1999). Critical education in resource and environmental management: Learning and empowerment for a sustainable future. *Journal of Environmental Management*, 57(2), 85–97. <https://doi.org/10.1006/jema.1999.0289>
- Edwards, S. (2023). Freire for twenty-first-century, austerity-driven schools: Creating positive educational relations with and among students at the margins. *IJSP*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2023.v12.x.006>
- Faizal, F. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 35–51.
- Fatihin, M. K., Rasyad, A., & Zulkarnain, Z. (2021). Community Empowerment Facilitator Strategy in Pendopo Kembangkopi as a Village Community Learning Effort Based on Social, Economic and Environmental. *1st International Conference on Continuing Education and Technology (ICCOET)*, 589, 198–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211101.037>
- Filmawada, Z., Hardika, H., & Sucipto, S. (2018). Peran kader PKK sebagai agen perubahan kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui pendampingan program bank sampah. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 13(2), 78–84.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary Edition, with an Introduction by Donald Macedo*. <https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf>
- Grace, R. A., & Harrington, S. Y. (2015). Our Children, Our Schools: Seeking Solutions for Improving the Climate in Urban Public Schools. *Alabama Journal of Educational Leadership*, 2, 1–14.

- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429.
- Hanifa, N., Rachmawati, L., & Cahyono, H. (2021). Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Pemberdayaan Pemuda di Desa Binaan Pamekasan. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 91–98.
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village In Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e05466. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-038>
- Harris, A., Day, C., Hopkins, D., Hadfield, M., Hargreaves, A., & Chapman, C. (2013). *Effective Leadership for School Improvement (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203754849>
- Hasan, R. O., Sahara, L. S., Abidin, J., & Erfinda, Y. (2025). Peran Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Destinasi Wisata Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru, Kab. Karawang – Jawa Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 919–930. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18278>
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781316342855>
- Inten, P. (2024). Jinshin no hana as a communication strategy in batik tulis community development. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(1), 135–150. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.6868>
- Isa, Abd. H., & Anu, Z. (2024). Pelatihan Keterampilan Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 13(1), 94–111. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v13i1.18414>
- Kenny, S., McGrath, B., & Phillips, R. (2018). The Routledge Handbook of Community Development. In *The Routledge Handbook of Archaeoethanatology*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351030625>
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. <https://doi.org/10.1080/0142159x.2020.1755030>
- Krisna, A., Citra, D., Januariantia, J., Amertha, S., Wiweka, D., & Laksmi, P. A. S. (2024). Development Strategy for Tangkup Waterfall Towards Sustainable Tourism. *Community Services: Sustainability Development*, 1(2), 73–78.
- Lochmiller, C. (2021). Conducting Thematic Analysis with Qualitative Data. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>
- Lohman, K., Pearce, R., & Craig, G. (2023). Learning from the history of community development. *Community Development Journal*, bsad004. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsad004>
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik urgensi desa di era otonomi daerah. *Journal of Rural and Development*, 4(2).
- Lynch, D., Forde, C., & Lathouras, A. (2020). Changing Contexts of Practice: Challenges for Social Work and Community Development. *Australian Social Work*, 73(2), 245–253. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1694047>

- Miller, E., Porter, J., & Barbagallo, M. (2022). Simplifying Qualitative Case Study Research Methodology: A Step-By-Step Guide Using a Palliative Care Example. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6478>
- Morse, S., & McNamara, N. (2013). *Sustainable Livelihood Approach: A Critique of Theory and Practice*. Springer Science & Business Media.
- Nazeri, N., Hidayat, R., & El Maza, R. (2024). Encouraging Community Empowerment and Local Economic Independence in Villages through Sustainable Economic Development Techniques. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 2(04), 614–620. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v2i04.1442>
- Nugroho, B. E. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Oka, I. M. D., Murni, N. G. N. S., & Mecha, I. P. S. (2021). The Community-Based Tourism at The Tourist Village in The Local People's Perspective. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 988–996. <https://doi.org/10.30892/gtg.38401-735>
- Orbawati, E. B., Fadlurrahman, F., Sujatmiko, S., & Mukti, A. (2024). Empowering Communities Through the Desa Berdaya Program: Lessons from Bligo Village. *Society*, 12(2), 397–414. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.445>
- Pawar, M. (2019). Social Work and Social Policy Practice: Imperatives for Political Engagement. *The International Journal of Community and Social Development*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.1177/2516602619833219>
- Pratiwi, R., Widyatania, D. T., Luthfi, J., Kustanti, R., Maulidya, S. Y., & Baharrudin, S. (2023). Pengembangan SDM untuk Desa Wisata Papringan Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. *Jurnal Abdidas*, 4(2), 173–178. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i2.770>
- Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. D. (2021). Rethinking Sustainable Community-Based Tourism: A Villager's Point of View and Case Study in Pampang Village, Indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3245. <https://doi.org/10.3390/su13063245>
- Raharjo, K. M., Sucipto, S., Ishom, Moh., & Fatihin, M. K. (2024). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 115–121. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2000>
- Rahu, P. D., & Suprayitno, S. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR*.
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Rohmah, N., Ishom, M., & UM, J. P. L. S. F. (2018). Analisis Jejaring Agen Perubahan dalam Pengembangan Desa Wisata Edukatif. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11(2), 83–87.

- Saepudin, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. *Dharmakarya*, 11(3), 227. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i3.27569>
- Salma, Wijaya, A. A. M., Basir, Muh. A., & Lawelai, H. (2022). Community Based Tourism in The Development of Sustainable Tourism in Baubau City. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i1.32>
- Shaked, H. (2016). Parental participation fees in school expenses in Israel. *International Journal of Educational Management*, 30(1), 63–75.
- Sucipto, S., & Fatihin, M. K. (2024). Participatory Learning for Rural Community Empowerment. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 30(1), 68. <https://doi.org/10.17977/um048v30i1p68-78>
- Sucipto, S., Nasih, A. M., Raharjo, K. M., & Fatihin, M. K. (2024). How does community education encourage sustainable development? A comprehensive strategy strengthens the role of community facilitators. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(2). <https://doi.org/10.21831/cp.v43i2.66623>
- Suharto, S. (2019). *Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa Di Jawa Tengah -Tahun 2018*. 4. <https://doi.org/10.31942/SD.V4I2.3117>
- Suherlan, H., Adriani, Y., Pah, D., Fauziyyah, I., Evangelin, B., Wibowo, L., Hanafi, M., & Rahmatika, C. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. *Barista : Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(1), 99–111. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>
- Sukmawati, D., & Maryanti, R. (2021). Development of Education and Economic Circulation in Supporting Local Potential as Community Empowerment Efforts Amid the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 235–250. <https://doi.org/10.17509/ijomr.v1i2.37598>
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, C., Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Community Empowerment as Socio-Economic Education of Tourism Villages Based on Local Wisdom. *Education Quarterly Reviews*, 5(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.524>
- Sulaiman, A. I., Sugito, T., & Sabiq, A. (2016). Komunikasi pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 233–252.
- Sunarjanto, N. A., Harimurti, Y., Widyaningdyah, A. U., Kusnanto, Y. B., & Tejosaputra, L. R. (2021). Pendampingan Komunitas Petani Jeruk dalam Memetakan Kebutuhan Menuju Desa Wisata Modongan Kabupaten Mojokerto. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 16–28.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60.
- Suyanto, Standsyah, R. E., & Ramadhan, D. S. (2024). Community Economic Empowerment for the Creation of Self-Sufficient Villages. *Help: Journal of Community Service*, 1(2), 148–156. <https://doi.org/10.62569/hjcs.v1i2.63>
- Topatimasang, R., Rahardjo, T., & Fakhri, M. (2010). *Pendidikan populer: Membangun kesadaran kritis*. INSISTPress.
- Wondimu, H., Delelegn, W., & Dejene, K. (2022). What do female-headed households' livelihood strategies in Jimma city, South west Ethiopia look like from the perspective of the sustainable

livelihood approach? *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2075133.

<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2075133>

Zulkarnain, Z., Raharjo, K. M., Fatihin, M. K., & Avriliand, D. (2022). Optimizing the Role of Non-formal and Informal Education in Realizing Independent and Sustainable Village Innovations. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 10(2), 183–192.